



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 187 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 tahun 2014 tentang Pedomandalam Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Darut Tauhid II Alamat Jalan Raya Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
 - b. Bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Darut Tauhid II perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darut Tauhid II.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah RI No.47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah RI No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No.77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang **Pengembangan dan Organisasi Kementerian Negara** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang **Perubahan kelima** atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang **Pengembangan dan Organisasi Kementerian Negara**;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I** kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014 tentang **Perubahan ketujuh** atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang **Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I** kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang **Organisasi dan tata Kerja Kementerian Agama** (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2014** tentang **Perubahan ketiga** atas **Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010** tentang **Tata Kerja Kementerian Agama** (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun tentang **Organisasi dan tata Kerja instansi vertikal Kementerian Agama** (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang **Pendidikan Keagamaan Islam** (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang **Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren** (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 972).

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2015.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah Tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darut Tauhid II;
- Pertama** : Menetapkan Pondok Pesantren Darut Tauhid II Alamat Jalan Raya Parit Banjar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah berhak untuk mendapatkan Izin Operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;
- Kedua** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai nilai keindonesiaan, kebangsaan, Kenegaraan dan kesatuan yang didasarkan atas Negara Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Binika Tunggal Ika;
- Ketiga** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan baik oleh masyarakat maupun instansi Pemerintah;

cepat

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutahiran kembali.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 15 Desember 2015



Kepala,

Drs. H. Kasiman, HN
NIP. 195805131979031001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama RI di - Jakarta
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak
3. Kepala KUA Kecamatan Mempawah Hilir.